

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Definisi Koperasi

Kata koperasi berasal dari Bahasa Latin yaitu *Coopere (co-operasional)* yang artinya kerja sama. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan perorangan yang kegiatannya melandaskan prinsip koperasi dan juga sebagai gerakan ekonomi yang berdasarkan atas kekeluargaan. Menurut UU Nomor 17 Tahun 2012 Pasal (1) Ayat (1) tentang perkoperasian, koperasi merupakan badan hukum yang berdiri dari perorangan atau badan hukum koperasi, dengan modal yang digunakan sebagai menjalankan usaha yaitu dari pemisahan kekayaan anggota dan memenuhi kebutuhan bersama di dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya yang sesuai dengan nilai dan prinsip dari koperasi. Sedangkan menurut R.S Soeratmadja, koperasi merupakan badan usaha yang dimiliki dan dikendalikan oleh anggota, serta dioperasikan dengan dasar nirlaba atau biaya. Jadi, koperasi adalah sebuah badan usaha yang didirikan untuk perkembangan ekonomi dengan cara memenuhi kebutuhan ekonomi para anggotanya yang berlandaskan kekeluargaan atau kerja sama.

Koperasi didirikan dengan tujuan utama yaitu membantu pemerintah dalam perkembangan ekonomi, mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur di Indonesia. Tujuan koperasi lainnya adalah sebagai berikut:

1. Koperasi diadakan untuk meningkatkan taraf hidup bagi masyarakat, khususnya anggota yang terlibat,
2. Bagi para pelaku UKM, koperasi bisa menjadi tempat yang untuk memperoleh modal dan tentunya mengadakan kegiatan usaha secara bersama,
3. Berperan dalam membangun tatanan perekonomian nasional,
4. Sedangkan untuk produsen koperasi menjadi tempat untuk menawarkan barang dengan harga yang relatif tinggi.

Menurut Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi dapat dikelompokkan berdasarkan jenis usaha, keanggotaan dan tingkatan.

1. Koperasi berdasarkan jenis usaha:

- a. Koperasi produsen

Koperasi produsen merupakan koperasi dengan kegiatan pelayanan di bidang pengadaan barang produksi seperti bahan baku dan penolong untuk anggota koperasi ini terdiri dari pengusaha kecil atau UMKM.

- b. Koperasi konsumen

Koperasi konsumen adalah koperasi yang melayani kebutuhan sehari-hari dengan menyediakan barang maupun jasa.

- c. Koperasi Simpan Pinjam (KSP)

Koperasi simpan pinjam atau KSP sering disebut sebagai koperasi kredit merupakan koperasi yang kegiatannya melayani anggotanya dengan menyediakan simpan pinjam koperasi ini bertujuan untuk menolong dan memberikan pinjaman dengan bunga ringan.

- d. Koperasi Serba Usaha

Koperasi serba usaha merupakan koperasi yang berdiri dengan kegiatan menjual kebutuhan pokok dan barang barang hasil produksi anggota,

melayani simpan pinjam dan pelayanan jasa.

2. Koperasi berdasarkan keanggotaannya:

- a. Koperasi pegawai negeri merupakan koperasi yang beranggotakan para pegawai negeri baik pegawai pusat maupun daerah.
- b. Koperasi pasar merupakan koperasi yang anggotanya para pedagang pasar.
- c. Koperasi Unit Desa (KUD) merupakan koperasi yang anggotanya dari masyarakat pedesaan seperti petani dan nelayan. KUD melakukan kegiatannya dengan menyalurkan sarana produksi pertanian seperti pupuk, bibit tanaman, obat pemberantasan hama dan alat alat pertanian. Serta KUD memberikan Penyuluhan teknis kepada para petani.
- d. Koperasi sekolah koperasi ini beranggotakan warga sekolah seperti guru karyawan sekolah dan siswa. Koperasi ini menyediakan kebutuhan warga sekolah seperti alat tulis, buku pelajaran serta makanan.

3. Koperasi berdasarkan tingkatan

a. Koperasi primer

Koperasi primer merupakan koperasi yang beranggotakan minimal 20 orang.

b. Koperasi sekunder

Koperasi sekunder merupakan koperasi yang beranggotakan beberapa koperasi. Koperasi sekunder meliputi:

- Pusat koperasi yang anggotanya minimal lima koperasi primer dan berada di satu kabupaten atau kota.
- Gabungan koperasi, koperasi yang beranggotakan minimal tiga pusat koperasi yang wilayahnya satu provinsi atau lebih.

2.1.2 Koperasi

Koperasi merupakan koperasi yang anggotanya minimal tiga gabungan koperasi. Koperasi berdiri dan melakukan kegiatannya secara keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas yang dapat diakui, diterima dan dipercaya oleh anggota maupun masyarakat luas. Prinsip koperasi, yaitu anggota yang bersifat suka rela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, kemandirian, pendidikan koperasi dan kerjasama antar koperasi. Keterbukaan atau transparansi merupakan prinsip yang paling utama di koperasi. Memegang prinsip ini, koperasi dapat di akui, diterima dan dipercaya, oleh anggota maupun oleh masyarakat luas. Koperasi bisa berjalan atau terlaksana dengan baik, jika adanya penerapan prinsip koperasi yaitu melalui penyelenggaraan akuntansi secara benar dan tertib. Oleh karena itu, perlu adanya kekhususan di bidang keuangan untuk menerapkan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan. Laporan keuangan koperasi memberikan informasi menyangkut kondisi, kinerja dan perubahan posisi keuangan koperasi. Serta memberikan manfaat bagi pengambilan keputusan secara strategis untuk pengembangan koperasi.

2.1.2 Laporan Keuangan

2.1.2.1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan dapat memberikan informasi kondisi keuangan perusahaan dan dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan. Menurut Munawir, laporan keuangan merupakan alat untuk mendapatkan informasi posisi keuangan serta pencapaian dari perusahaan, laporan keuangan ini diharapkan dapat membantu para pengguna (*user*) untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat *financial*. Sedangkan menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) laporan keuangan adalah bagian proses dari pelaporan keuangan meliputi neraca, laporan laba-rugi, laporan perubahan posisi keuangan.

Laporan keuangan pada koperasi juga sebagai laporan keuangan pertanggungjawaban pengurus tentang tatanan kehidupan koperasi. Laporan keuangan pada koperasi ini juga bisa dijadikan salah satu alat evaluasi untuk kemajuan koperasi. Pengguna dari laporan keuangan koperasi (*main users*) adalah:

1. Para anggota koperasi
2. Pejabat koperasi
3. Calon anggota koperasi
4. Bank
5. Kreditur
6. Kantor pajak

Kemudian untuk manfaat laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Informasi untuk kondisi dan perkembangan keuangan baik bagi perorangan maupun perusahaan serta sebagai bahan pengambilan keputusan yang tepat dan akurat.
2. Informasi bagi manajemen perusahaan
3. Menetapkan hak bagi masing-masing pihak baik internal maupun eksternal yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan.
4. Mengawasi dan mengendalikan suatu kegiatan yang terjadi di perusahaan.
5. Membantu perusahaan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
6. Membantu perusahaan mengetahui laba yang diperoleh.
7. Memudahkan perusahaan untuk menghitung dan menentukan hak dari berbagi pihak internal maupun eksternal
8. Menyediakan informasi yang berguna bagi manajemen
9. Mengelola dan mengawasi aktivitas dalam perusahaan
10. Memudahkan pencapaian target yang telah ditetapkan

Laporan keuangan koperasi harus memenuhi ketentuan dalam penyajian kualitatif laporan keuangan, antara lain:

1. Karakteristik yang bersifat spesifik:
 - a. Laporan keuangan merupakan laporan selama satu periode akuntansi untuk laporan sebagai bahan untuk menilai hasil kerja pengelola koperasi
 - b. Laporan keuangan koperasi sepakan bagian dari sistem pelaporan koperasi yang ditujukan untuk pihak internal maupun eksternal koperasi
 - c. Laporan keuangan koperasi harus berdaya guna bagi para anggotanya, antara lain:
 - prestasi koperasi secara khusus memberikan pelayanan kepada para anggotanya selama satu periode akuntansi tertentu
 - prestasi koperasi secara khusus ditujukan untuk tujuan bisnis dengan non anggota selama satu periode akuntansi tertentu
 - informasi lainnya yang mempengaruhi keadaan keuangan koperasi jangka pendek dan panjang.

Laporan keuangan harus disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar yang berlaku di Indonesia, yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). SAK ETAP dimaksudkan untuk digunakan oleh Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP), yaitu entitas yang tidak memiliki tanggung jawab publik dan mempublikasikan laporan keuangan untuk pengguna eksternal. Contoh dari pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dan pengelolaan usaha, kreditur dan lembaga pemeringkat kredit.

Dalam Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, Pasal 35 menyebutkan bahwa setelah tahun buku koperasi ditutup, paling lambat satu bulan sebelum diselenggarakan rapat anggota tahunan, pengurus menyusun laporan tahunan yang memuat sekurang-kurangnya:

1. Neraca
2. Perhitungan hasil usaha

3. Catatan atas laporan keuangan

Komponen laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP, yaitu:

1. Laporan perubahan ekuitas
2. Laporan arus kas

Penyajian kualitatif laporan keuangan koperasi menurut SAK ETAP, sebagai berikut:

1. Dapat dipahami

Dalam laporan keuangan diperlukan kualitas informasi dalam penyajian sehingga dapat dipahami oleh pengguna;

2. Relevan

Informasi keuangan yang disajikan harus relevan, karena untuk proses pengambilan keputusan dan dapat membantu dalam melakukan evaluasi;

3. Materialitas

Informasi yang disampaikan cukup untuk pos-pos yang jumlahnya material disajikan sendiri dalam laporan keuangan, sedangkan yang tidak material digabungkan dalam sifat atau fungsi yang sejenis.

4. Keandalan

Informasi harus memiliki kualitas andal jika laporan keuangan bebas dari kesalahan material dan bias.

5. Substansi mengungguli bentuk

Untuk transaksi dan peristiwa dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi.

6. Pertimbangan sehat

Artian dari pertimbangan sehat ialah saat melakukan pertimbangan dalam kondisi ketidakpastian mengandung unsur kehati-hatian. Pertimbangan

sehat tidak memperkenalkan pada pembentukan aset lebih rendah atau pencatatan kewajiban atau beban yang lebih tinggi

7. Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan, karena itu tidak dapat diandalkan dan kurang mencukupi jika ditinjau dari segi relevansi

8. Dapat dibandingkan

Laporan keuangan koperasi dapat dibandingkan antar periode mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan dan juga dapat dibandingkan antar koperasi atau koperasi dengan usaha lain untuk mengevaluasi posisi keuangan secara relatif.

9. Tepat waktu

Penyediaan informasi laporan keuangan harus tepat waktu dalam jangka waktu pengambilan keputusan

10. Keseimbangan antara biaya dan manfaat

Dalam evaluasi manfaat dan biaya, entitas harus memahami bahwa manfaat informasi mungkin juga manfaatnya yang dinikmati oleh pengguna eksternal.

Penyediaan informasi laporan keuangan harus tepat waktu dalam jangka waktu pengambilan keputusan

2.1.3 Standar Akutansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)

Standar Akutansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas

publik, yaitu entitas yang tidak memiliki tanggung jawab publik dan mempublikasikan laporan keuangan untuk pengguna eksternal. Contoh dari eksternal tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur dan lembaga pemerintah kredit.

Tujuan dari SAK ETAP yaitu untuk menciptakan fleksibilitas diharapkan dapat memberikan kemudahan akses ETAP kepada pendanaan dari perbankan. SAK ETAP berdiri sendiri dan tidak mengacu terhadap SAK Umum sehingga menggunakan konsep dan mengatur transaksi oleh ETAP bentuk pengaturan SAK ETAP sederhana dalam hal perlakuan Akutansi dan tidak berubah daripada SAK Umum.

2.1.4 Ruang lingkup SAK ETAP

Menurut IAI dalam SAK ETAP (2016) Standar Akutansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik dimaksudkan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik yaitu entitas yang:

1. Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan
2. Mempublikasikan laporan keuangan untuk pengguna eksternal

Menurut IAI dalam SAK ETAP (2016), Entitas yang telah memiliki akuntabilitas publik signifikan jika:

1. Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal
2. Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai Fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, Pialang dan atau perdagangan efek, dana pensiun, reksadana Dan bank Investasi.

2.1.5 Laporan Keuangan Lengkap Menurut SAK ETAP

Dalam SAK ETAP (2009) laporan keuangan entitas yang lengkap meliputi:

1. Neraca

Dalam neraca menyajikan aset, kewajiban dan ekuitas dari suatu entitas pada suatu tanggal tertentu sampai akhir periode pelaporan. Neraca minimal mencakup pos-pos sebagai berikut:

- a. Kas dan setara kas
- b. Piutang usaha dan piutang lainnya
- c. Persediaan
- d. Properti investasi
- e. Aset tetap
- f. Aset tidak berwujud
- g. Utang usaha dan utang lainnya
- h. Aset dan kewajiban pajak
- i. Kewajiban diestimasi
- j. Ekuitas

Entitas harus menyajikan pos, judul dan sub jumlah lainnya pada neraca jika penyajian seperti itu relevan untuk pemahaman terhadap posisi keuangan entitas.

2. Laporan laba rugi

Laporan laba rugi merupakan selisih pos penghasilan dan beban yang di akui dalam suatu periode. Laporan laba rugi minimal mencakup pos pos sebagai berikut:

- a. Pendapatan
- b. Beban keuangan
- c. Bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas
- d. Beban pajak
- e. Laba atau rugi
- f. Entitas harus menyajikan pos, judul dan sub jumlah lainnya

pada laporan laba rugi jika penyajian tersebut relevan untuk memahami ke neraca keuangan entitas.

3. Laporan perubahan ekuitas, serta juga menunjukkan:

- Seluruh perubahan dalam ekuitas
- Perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik

Pada laporan perubahan ekuitas, menyajikan laba atau rugi entitas untuk suatu periode. Pos pendapatan dan beban yang di akui secara langsung dalam ekuitas, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan dan jumlah investasi dan dividen dan distribusi lain ke pemilikan ekuitas selama periode. Entitas menyajikan laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan:

- a. laba atau rugi untuk periode
- b. pendapatan dan beban di akui secara langsung dalam ekuitas
- c. untuk setiap komponen Ekuitas, pengaruh perubahan kebijakan Akuntansi dan koreksi kesalahan untuk setiap komponen Ekuitas, suatu rekonsiliasi antara jumlah tercatat awal dan akhir periode, diungkapkan secara terpisah perubahan yang berasal dari:

- Laba atau rugi,
- Pendapatan dan beban di akui secara langsung dalam ekuitas,
- Jumlah investasi, dividen dan distribusi lainnya ke pemilik ekuitas, yang menunjukkan secara terpisah modal saham, transaksi saham treasury dan dividen serta distribusi lainnya ke pemilik ekuitas dan perubahan kepemilikan dalam entitas anak yang tidak mengakibatkan kehilangan pengendalian.

4. Laporan arus kas

Laporan arus kas merupakan rangkuman penerimaan dan pembayaran khas untuk periode waktu tertentu, seperti satu bulan atau satu tahun.

5. Catatan atas laporan keuangan, berisi mengenai ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Catatan atas laporan keuangan memberikan informasi tambahan yang disajikan dalam laporan keuangan. Informasi yang diberikan menjelaskan secara naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan harus:

- a. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan Akutansi tertentu,
- b. Mengungkapkan informasi yang di Isyaratkan dalam SAK ETAP tetapi tidak disajikan dalam laporan keuangan, dan
- c. Memberikan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tetapi relevan untuk memahami laporan keuangan.

Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis dan praktis. Urutan penyajian catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK ETAP,
- b. Memberikan ringkasan mengenai kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan,
- c. Informasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan, sesuai

dengan urutan penyajian setiap komponen laporan keuangan keuangan dan urutan penyajian pos-pos tersebut,

d. Pengungkapan lain

2.1.6 Pengakuan

2.1.6.1 Pengakuan Unsur Unsur Laporan Keuangan

Pengakuan unsur laporan merupakan proses dari pembentukan suatu pos dalam neraca atau laporan laba rugi yang telah memenuhi definisi dan memenuhi kriteria yaitu sebagai berikut: Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang terkait dalam pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas, dan pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Kegagalan untuk mengakui paus yang memenuhi kriteria tersebut tidak dapat digantikan dengan pengungkapan kebijakan Akutansi yang digunakan atau catatan atau materi penjelasan.

2.1.6.2 Pengakuan dalam Laporan Keuangan

1. Aset dapat diakui dalam neraca, jika kemungkinan manfaat ekonominya di masa depan akan mengalir ke entitas dan aset tersebut memiliki nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset tidak dapat diakui apabila dipandang tidak mungkin mengalir ke dalam entitas setelah periode pelaporan berjalan dan tidak memiliki manfaat ekonominya.
2. Kewajiban dapat diakui dalam neraca, jika kemungkinan pengeluaran mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban masa kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal.
3. Pendapatan dapat diakui jika akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal. Pengakuan pendapatan atas dasar berikut:

1. Bunga harus diakui secara akrual,

2. Royalti diakui dan menggunakan dasar akrual sesuai dengan substansi dari perjanjian yang relevan dan
3. Dividen harus di akui hak pemegang saham untuk menerima pembayaran telah terjadi.
4. Beban merupakan aset yang digunakan atau jasa yang dikonsumsi dalam proses menghasilkan pendapatan. Pengakuan beban merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Dapat di akui dalam laporan laba rugi jika mengalami penurunan manfaat ekonomi pada masa yang akan datang dan berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban yang telah terjadi dan dapat diukur secara andal. Entitas harus mengakui biaya atas seluruh imbalan kerja yang menjadi hak pekerja baktikan kepada entitas selama periode pelaporan yang pertama sebagai kewajiban, setelah dikurangi jumlah yang telah diperbaiki secara langsung kepada pekerja atau sebagai kontribusi pada adanya imbalan kerja.
5. Laba atau Rugi. Laba merupakan selisih antara jumlah diterima dan jumlah yang dibayarkan untuk input yang digunakan akan barang atau jasa. Sedangkan rugi merupakan jumlah di mana beban melebihi pendapatan. Laba atau rugi didapat dari selisih aritmatika antara penghasilan dan beban.

2.1.7 Pengukuran

Pengukuran merupakan proses penetapan jumlah uang yang telah digunakan oleh entitas untuk mengukur aset, kewajiban, penghasilan dan beban dalam laporan keuangan dasar dari pengukuran ini adalah biaya historis dan nilai wajar. Biaya historis adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau baca tadi pembayaran yang diberikan untuk memperoleh aset pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar kas atau setara kas diterima atau kas yang diterima sebagai penukar dari kewajiban pada saat terjadi adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset atau untuk menyelesaikan suatu

kewajiban, antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar.

1. Pendapatan

Entitas harus mengukur pendapatan berdasarkan nilai wajar atas pembayaran yang diterima atau masih harus diterima.

2. Beban

Pada beban pengukuran berdasarkan biaya pinjaman yang mencakup bunga untuk cerukan bank dan pinjaman jangka pendek dan panjang, Amortisasi biaya tambahan yang timbul sehubungan dengan proses perjanjian peminjaman.

2.1.8 Penyajian

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas suatu entitas pengungkapan tambahan diperlukan apabila kepatuhan atas persyaratan sesuai SAK ETAP tidak memadai bagi pemakai. Guna untuk memahami pengaruh dari transaksi tertentu, peristiwa dan kondisi lain atas posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas.

Laporan keuangan disajikan secara lengkap termasuk informasi, komparatif minimumsatu tahun sekali. Ketika akhir periode pelaporan entitas berubah dan laporan keuangan telah disajikan untuk periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, ditas mengungkapkan fakta tersebut dengan alasan penggunaan untuk periode lebih panjang atau lebih dan fakta bahwa jumlah komparatif untuk laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan laba rugi dan saldo laba, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang terkait adalah tidak dapat seluruhnya diperbandingkan penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten kecuali terjadi perubahan yang signifikan atas sifat operasi entitas atau perubahan penyajian atau pengklasifikasian bertujuan menghasilkan lebih baik sesuai kriteria pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi dan kesalahan. SAK

ETAP mensyaratkan suatu perubahan penyajian laporan laba rugi minimal mencakup pos pendapatan, bukan keuangan, bagian laba atau rugi dari inventasi dengan menggunakan metode ekuitas, bukan pajak dan laba atau rugi netto.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Kajian Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Raflesia Nurdita (2012)	Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAKETAP) Pada Koperasi Yang Ada di Kota Dumai	Sebagian besar koperasi yang ada di Kota Dumai sudah melakukan pelaporan keuangan sederhana namun hanya sebagian kecil yang benar-benar menerapkan SAK ETAP ke dalam laporan keuangannya.
2	Beth Sianne Andreas (2014)	Evaluasi Atas Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAKETAP) Pada Laporan Keuangan Koperasi di Kota Bandar Lampung (Studi Kasus Pada KPRI di Bandar Lampung)	Setiap koperasi telah melakukan pencatatan akuntansi sederhana namun tidak sesuai dengan SAK-ETAP sehingga perlu dilakukan pengenalan dan sosialisasi SAK ETAP terhadap pengurus koperasi di Bandar Lampung

3.	Fajar Teguh Nur Cahyo (2014)	Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) (Studi Kasus Pada Koperasi Batari Solo)	Laporan keuangan yang disajikan oleh Koperasi Batari belum menyajikan Laporan keuangan secara sederhana. Batari belum melakukan penerapan SAK ETAP secara penuh sebagai standar dalam penyusunan laporan keuangan Koperasi Batari.
4.	Vyta Vebiyanti (2016)	Analisis Penerapan SAK ETAP pada Laporan Keuangan Entitas Koperasi (Studi Kasus pada Koperasi Kelompok Tani “Jaya Makmur” di Banyuwangi	Hasil dari penelitian ini adalah penyajian dalam laporan keuangan Koperasi Kelompok Tani “Jaya Makmur” di Banyuwangi masih terdapat beberapa ketidaksesuaian dengan kaidah penyajian laporan keuangan menurut kaidah SAK ETAP.
5.	Siagian, R. P., & Pangemanan, S. (2016)	Analisis Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan SAK-ETAP Pada Koperasi Karyawan Bank Sulut Go.	Hasil penelitian laporan keuangan masih terdapat beberapa ketidaksesuaian dengan kaidah penyajian laporan keuangan menurut SAK ETAP.

6.	Zainal (2019)	Analisis Penerapan SAK ETAP dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada KSU Sumber Rezeki Kota Binjai	Hasil dari penelitian ini adalah penyajian dalam laporan keuangan KSU Sumber Rezeki Kota Binjai masih terdapat beberapa ketidaksesuaian dengan kaidah penyajian laporan keuangan menurut kaidah SAK ETAP.
----	---------------	--	---